BAB II

KERANGKA TEORETIK

A. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang konflik sosial

a. Pengertian konflik

Istilah konflik cenderung menimbulkan respon-respon yang bernada ketakutan atau kebencian, padahal konflik itu sendiri merupakan suatu unsur yang penting dalam pengembangan dan perbuatan. Konflik juga diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya:

Adapun definisi dari konflik sosial adalah :

1) Suatu kondisi di mana tujuan, kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang bersaing, bertabrakan dan akibatnya terjadilah agrasi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan (*schelling*).
2) Suatu yang terjadi ketika ada perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang antara beberapa orang, kelompok organisasi.
3) Sikap mempertahankan diri dari sekurang-kurangnya di antara dua kelompok yaitu: memiliki tujuan dan pandangan berbeda dlm posisi oposisi kerjasama.[1]

[1] http://id.scvoong.com/social-sciences/1838186 makna koflik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Webster (1996) istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain". Dengan kata lain, istilah sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat istilah "*conflict*" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Selain itu webster menguraikan bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.[2]

Beberapa proposisi teori konflik sosial. Penganut teori konflik menunjukkan persepsi yang sangat berbeda kalangan fungsionalis dalam memahami masyarakat. Jika kalangan fungsional melihat adanya saling ketergantungan dan kesatuan didalam masyarakat, maka kalangan penganut teori konflik justru melihat masyarakat merupakan arena di mana suatu kelompok dengan yang lain saling bertarung untuk memperebutkan "power" dan mengontrol bahkan melakukan penekanan bagi saingan-saingan mereka.

---

[2] Depan G. Pruit dan Jetkey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wallace dan Alison, teori satu dengan yang lain saling berhubungan, yaitu:

1) Asumsi utama teori konflik menegaskan, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan itu.
2) Asumsi ini menunjukkan "power" (kekuasaan) bukanlah sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata, sehingga merupakan sumber konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa (*coercive*).
3) Asumsi ideologi dan nilai-nilai dipandangnya sebagai senjata yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok yang berbeda untuk menarik tujuan dan kepentingan mereka masing-masing.

Berikut ini disajikan beberapa proposisi teori konflik sebagai berikut:

Proposisi *Pertama*: semakin tdk mrk distribusi sumber-sumber di dalam suatu sistem, akan semakin dominan dg segmen lemah didalam suatu sistem. Dalam proposisi ini, Max memandang bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi sumber-sumber terutama kekuasaan, merupakan determinan konflik kepentingan obyektif di antara mereka yang memiliki kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.

Proposisi *Kedua*: proposisi ini menerangkan dengan jelas tentang adanya kesadaran segmen-segmen yang lebih lemah semakin menyadari akan kepentingan-kepentingan kolektif mereka, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin besar kemungkinan mereka itu akan mempertanyakan keabsahan distribusi-distribusi yang tidak merata dengan cara terang-terangan terhadap segmen-segmen dominan suatu system.

Proposisi *Ketiga*: apabila segmen-segmen yang lemah (*subordinate*) di dalam suatu sistem semakin sadar akan kepentingan-kepentingan kelompok mereka maka semakin besar kemungkinan mereka mempermasalahkan keabsahan distribusi-distribusi sumber-sumber dan semakin pula kemungkinannya mereka mengorganisir untuk memulai konflik secara terang-terangan terhadap segmen dominan suatu sistem. Proposisi ini dipecah menjadi tiga anak proposisi sebagai berikut: 1) subordinate mengorganisir diri dan memulai konflik; 2) subordinate mengorganisir dan mencetuskan konflik; 3) dubordinate mengirganisir diri dan memprakarsai konflik.

Proposisi *Keempat*: proposisi ini mengandung pengertian apabila segmen-segmen subordinate semakin dipersatukan oleh keyakinan umum dan semakin berkembang struktur kepemimpinan politik mereka maka segmen-segmen dominan dan segmen-segmen yang dikuasai yang lebih lemah akan semakin terpolarisasi.[3]

b. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik

Menurut Dahrendorf, analisis masyarakat dengan segi pandangan konflik bertitik tolak dari kenyataan bahwa terdapat dua yaitu orang yang berkuasa dan mereka yang dikuasai dualisme ini yang termasuk

[3] Muhammad Basrawi dan Soenyono, *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), hal. 22-27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur dan hakekat tiap-tiap kehidupan bersama, mengakibatkan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan mungkin saling berlawanan. Adapun faktor yang menyebabkan konflik antara lain:

1) Kekuasaan

Kekuasaan adalah setiap kemampuan untuk menerangkan kemauan sendiri juga kalau kemauan itu bertentangan dengan kemauan orang lain. Barang kali pihak berkuasa lebih kuat fisiknya, sehingga mampu mengalahkan pihak lain, maka dengan adanya orang yang berkuasa atau mempunyai wewenang tentu akan terdapat sebagian besar orang di bawah wewenang mereka, maka masyarakat dapat dilihat sebagian jaringan relasi-relasi itu disifati sebagai berikut:

a) Adanya dua tipe relasi, yaitu: tipe superordinasi (relasi atasan dengan bawahan) dan ada tipe subordinasi (relasi bawahan dengan atasan).
b) Di mana ada relasi-relasi superordinasi dan subordinasi. Kita boleh mengandaikan bahwa pihak atasan mengontrol tingkah laku pihak bawahan melalui instruksi, pemerintah atau larangan.
c) Pengontrolan ini dianggap oleh pihak atasan menjadi kewajibannya dan sah (menurut hukum).
d) Karena unsur hukum lain, baik pihak bawahan yang tingkah-lakunya dikuasai maupun pihak atasan yang berwenang, selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat tahu dengan pasti sampai di mana batas wewenang seseorang dan batas kewajiban untuk taat. Hal ini cukup penting, karena pihak yang berwenang mungkin bertindak dengan sewenang-wenang atau melebihi wewenangnya, atau mereka mengontrol orang lain yang tidak berada di bawah wewenangnya.

e) Akhirnya oleh karena relasi-relasi superordinasi dan subordinasi mempunyai status hukum, maka setiap pelanggaran dapat menimbulkan hukuman atau tindakan disipliner bagi yang bersangkutan.

2) Kepentingan

Perbedaan-perbedaan dalam posisi-posisi sosial mengakibatkan kepentingan-kepentingan antagonistis di antara mereka yang bersangkutan. Pihak yang sedang berwenang mempunyai ruling interest yang berlainan dari kepentingan pihak yang dikuasai. Hal ini pernah diungkapkan oleh karl Mark di mana ia menyebut "pembelajaran kerja" sebagai permulaan masyarakat kelas dan kesadaran sesaat (*false congciusness*). Pihak yang berwenang berkepentingan dengan ketahanan dan kelestarian status Quo atau susunan sosial yang memberi kedudukan tinggih kepada mereka. Jadi mereka akan cenderung untuk membela dan mempertahankan status Quo itu, sebaliknya pihak yang dikuasai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu akan merasa diri tertekan dan terkekang oleh status Quo, sehingga menginginkan perubahan dan bahkan perombakan.

Mengingat bahwa kedua macam kepentingan ini bersifat antagonistis dan kontradiktoris, maka kita harus menarik kesimpulan bahwa integrasi dan pengakuan sah terhadap pimpinan selalu merupakan hal-hal yang tidak dapat dipastikan dan penuh bahaya. Bahkan sejarah dunia atau pun sejarah Indonesia membuktikan bahwa suatu struktur sosial yang nampaknya mantap dapat beruba dalam waktu singkat. Menurut Dahrendorf, situasi konflik suatu masyarakat dapat dimengerti dan diuraikan dengan paling mudah, kalau dilihat sebagai konflik mengenai hal sah tidaknya relasi-relasi wewenang yang sedang berlaku, pihak yang berkuasa mengidiologikan nilai-nilainya, menjadi nilai-nilai itu sakti. Dengan berbuat demikian, mereka berharap agar sahnya kedudukan mereka makin kokoh. Hanya konsep "kepentingan" dalam arti obyektif memadai konflik adalah situasi yang menyangkut hal terbaginya kedudukan-kedudukan sosial.

Perbedaan penting yang dibuat Dahrendorf sehubungan dengan konsep "kepentingan" adalah perbedaan antara kepentingan latent (terselubung, masih di bawah permukaan kesadaran) dengan kepentingan manifest (nyata dan disadari). Kepentingan latent tidak langsung disadari dan dimaksudkan oleh pihak yang bersangkutan. Kepentingan latent merupakan bagian obyektif dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi rosial. Kalau di bawah kondisi-kondisi tertentu yang sebentar lagi akan disebut kepentingan latent mulai disadari dan ditujui. Maka kepentingan latent akan berubah menjadi kepentingan manikes, yang terwujud ke dalam rencana-rencana dan program aksi.

c. Kelompok kepentingan yang antagonistis

Dalam uraiannya tentang kelompok-kelompok kepentingan yang antaginistis Dohrendorf membuat distingsi antara kelompok potensial dengan kelompok potensial dengan kelompok aktual. Kalau sejumlah orang mempunyai kepentingan bersama entah kepentingan itu disadari entah tidak disadari namun mereka belum berorganisasi dan bersatu, mereka disebut kelompok konklik potensial. Mereka mempunyai kemungkinan (potensi) untuk menjadi kelompok aktual, tetapi untuk sementara waktu hanya bernihnya saja ada. Ginsberg mengatakan bahwa mereka merupakan (*recruting field for groups*) ladang-ladang dari nama kelompok-kelompok dapat dikerahkan. Selama mereka belum mempunyai organisasi, mereka tidak bertemu, tidak saling mengnal, tidak tukar menukar pandangan atau menyusun rencana juang bersama, sehingga di antara mereka belum dapat lahir suatu solidaritas dan perasaan bersatu.

Apabila orang yang sekepentingan dipertemukan ke dalam satu partai, serikat buruh, tentara atau organisasi lain dan kepentingan mereka menjelma menjadi suatu program konkret, mereka menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok konflik aktual. Mereka makin menyadari kelompok konflik aktual. Mereka makin menyadari di mana letak kepentingan mereka dan struktur kekuasaan manakah dalam masyarakat merintangi mereka dan siasat manakah yang perlu disusun dan dilaksanakan. Mereka memasalahkan yang menentang status Quo, kalau dibandingkan dengan kelompok kepentingan potensial, kelompok kepentingan aktual selalu lebih kecil. Agar suatu kelompok kepentingan aktual dan kelompok konflik maka menurut Dohrendorf tiga macam kondisi perlu dipenuhi.

1) Kondisi-kondisi struktur di sini terdapat syarat-syarat lain:
   a) Harus ada suatu program, chather (piagam), atau sistem nilai-nilai yang merumuskan kepentingan atau tujuan kelompok yang bersangkutan.
   b) Harus ada anggota, pemimpin, kaum aktivis, kader, petunjuk konkret, sarana materiil, dan kegiatan yang terarah
   c) Harus ada orang yang menegaskan dan membanrakan kepentingan, siasat dan tujuan kelompok melalui rangkaian gagasan-gagasan yang sekaligus mengarahkan dan menyemangati.
2) Kondisi-kondisi politik

   Kondisi-kondisi politik entah melicinkan dan menguntungkan terbentuknya organisasi kelompok konflik, entah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambat. Umumnya dapat dikatakan, bahwa semakin totalitas struktur negara semakin sulitlah suatu organisasi oposisi dibentuk.

3) Kondisi-kondisi sosial

Pentinglah bagi terbentuknya suatu kelompok konflik aktual, bahwa anggotanya bertemu dan berinteraksi. Tindakanpaling radikal yang mencegah lahirnya suatu kelompok konflik ialah pembunuhan anggota-anggota potensialnya. Khususnya calon pemimpinnya, penahanan, pembuangan, pemojokan, pemindahan ke tempat jauh (kadang-kadang dengan disertai kenaikan pangkat 544atau status), tindakan mengadu domba dan memecah belah sering termasuk strategi pihak yang berwenang untuk mencegah pihak lawan bertemu dan berinteraksi.[4]

Coser menunjukkan bahwa konflik dengan kelompok luar akan membantu kemantapan batas-batas struktural dan juga dapat mempertinggih integrasi di dalam kelompok. Coser juga mengatakan bahwa "tingkat konsensus kelompok sebelum konflik terjadi" merupakan hubungan timbal balik paling penting dalam konteks apakah dapat mempertinggih integrasi di dalam kelompok. Selanjutnya Coser mengatakan bilamana konsensus dasa suatu kelompok lemah, maka ancaman dari luar menjurus bukan karena peningkatan kolesi pada apati umum dan akibatnya kelompok terancam oleh perpecahan.[5]

---

[4] K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 214-219
[5] Margaret M. Paloma, *Sosiologi Kontenporer*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Watkins, konflik terjadi bila terdapat dua hal *pertama*, konflik terjadi bila sekurang-kurangnyatdp dua pihak yang secara potensial dan praktis atau operasional dapat saling menghambat. Secara potensial artinya mereka memiliki kemampuan untuk menghabat. Secara praktis atau operasional, artinya kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada di dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Artinya bila kedua belah pihak tidak dapat menghambat atau tidak dapat melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi. *Kedua*, konflik dapat terjadi bila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak namun hanya salah satu pihak yang mungkin akan mencapainya.

Kebutuhan yang berbeda-beda dan yang bersamaan di antara dua pihak (aku lebih) secara potensial dapat menyebabkan konflik walaupun hal itu tidak akan selalu terjadi. kaitannya langsung antara konflik dan kebutuhan sangat tergantung pada bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam keinginan-keinginan dan tindakan pemenuhannya. Misalnya dua orang sama-sama memiliki kebutuhan yang besar untuk memberi kesan. Keduanya belum tentu terlibat ke dalam suatu konflik bila cara yang digunakan untuk memnehi kebutuhan tersebut tidak saling mengganggu. Namun bila keduanya mencoba memberikan kesan kepada orang lain serta menyombongkan diri. Konflik dapat timbul dengan mudah, konflik yang serupa juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat terjadi bila dua orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda menghasilkan tindakan yang saling mengganggu.

Di dalam arti inilah kebutuhan memang sangat berperan sebagai penyebab konflik, karena kebutuhan akan menentukan tindakan dan perilaku yang akan dilahirkan seseorang. Dengan demikian slaah satu faktor yang perlu diteliti di dalam usaha penyelesaian konflik ialah mengenali kebutuhan yang ada, baik yang disadari atau tidak atau yang diungkapkan di dalam komunikasi.

Mengingat kebutuhan senantiasa berubah dan dapat berpadu dengan kebutuhan lainnya, kemungkinan terjadinya konflik antar manusia merupakan hal yang wajar dan merupakan bunga kehidupan yang dapat memperkaya pengalaman seseorang.[6]

d. Bentuk-bentuk konflik

Ada tiga bentuk konflik yang penulis kemukakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Pada taraf di dalam diri seseorang; pada taraf ini konflik menunjukkan adanya pertentangann ketidakpastian atau emosi-emosi dan dorongan yang antagonistik di dalam diri seseorang.
2) Pada taraf kelompok; konflik-konflik dapat ditimbulkan dari konflik yang terjadi dalam diri individu, dari perbedaan-perbedaan para anggota kelompok dalam tujuan, nilai-nilai dan norma-norma,

[6] Robby I. Candra, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 19920, hal. 20-29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motivasi-motivasi mereka untuk menjadi anggota kelompok, serta minat-minat mereka.

3) Pada taraf masyarakat; pada taraf ketiga ini konflik yang bersumber pada perbedaan di antara nilai-nilai dan norma-norma kelompok serta minat disebabkan oleh adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosio ekonomi di dalam suatu kebudayaan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain.

Pada penulis seperti Coser, Follet, Simel dan Wilson memandang konflik suatu yang tidak bisa dicegah timbulnya. Yang secara potensial ada kegunaannya yang fungsional dan konstruktif. Namun sebaliknya dapat pula tidak bersifat fungsional dan destruktif. Konflik mempunyai potensi untuk memberikan pengaruh yang positif maupun yang negatif dalam berbagai taraf interaksi manusia.[7]

Adapun menurut Pruitt dan Galogan bentuk-bentuk konflik adalah:

a. Bentuk agresor-defender

Di dalam bentuk ini menarik garis pembeda antara kedua pihak yang berkonflik salah satu pihak yang "*agresor*" (menyerang), dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah tujuan yang mengakibatkannyaterlibat dalam konflik bersama pihak lainnya, yang "*defender*" (pihak yang bertahan). Agresor biasanya mulai dengan taktik-taktik yang tingan karena mengikat ongkos yang harus dikeluarkannya. Ttp bila tdk berhasil, ia akan berpindah ketaktik-taktik

[7] *Loc.Cit.*, hal. 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih berat, ini akan terus berlanjut sampai tujuannya tercapai atau sampai suatu titik dimana ongkos yang diantisipasi akan timbul. Defender hanya semata-mata bereaksi, ia akan semakin meningkatkan reaksinya sebagai respon terhadap eskalasi agresor. Agresor adalah pihak yang melihat adanya kesempatan untuk mengubah hal-hal yang searah dengan kepentingannya. Sedangkan defender adalah pihak yang berusaha menolak perubahan tersebut.

b. Bentuk spiral konflik

Bentuk spiral konflik ditemukan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh banyak ahli teori (North, Brody, dan Holsti, 1964; Osgood, 1962, 1966; Richardson, 1967). Bentuk ini menjelaskan bahwa eskalasi merupakan hasil dari suatu lingkaran setan antara aksi dan reaksi. Taktik-taktik contentious yang dilakukan oleh suatu pihak mendorong timbulnya respons contentious dari pihak lain, respons ini memberikan sumbangan terhadap tindakan contentious lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan. Ini membuat lingkaran konflik menjadi utuh dan kemudian mulai membentuk lingkaran berikutnya.

Ada dua kelompok besar spiral konflik, di dalam spiral konflik bersifat balas-membalas, masing-masing pihak menjatuhkan hukuman kepada pihak yang lain atas tindakan-tindakannya yang dianggap tidak menyenangkan, di dalam spiral defensif masing-masing. Pihak memberikan reaksi dalam rangka melindungi diri dari ancaman yang dirasakannya ada di dalam tindakan defensif pihak lain. Di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spiral defensif masing-masing pihak dapat dianggap sebagai agresor atau defender.

Spiral konflik menghasilkan eskalasi taktik ketika seperti sering terjadi setiap reaksi lebih keras dan intens dari reaksi sebelumnya. Hal ini juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya eskalasi taktik, karena pada kenyataannya sekali taktik berat digunakan, maka ia akan digunakan secara berkelanjutan oleh kedua belah pihak. Bila saya memukul kamu, maka (seperti yang sering terjadi) kamu akan balas memukul saya, sehingga saya akan memukul kamu lagi dan selanjutnya.

Sebagai penjelasan tambahan mengenai eskalasi taktik, model spiral konflik membantu kita dalam memahami tentang membesarnya konflik yang mengalami eskalasi proliferasi isu, dan bertambahnya perhatian terhadap konflik. Model spiral konflik memberikan pemikiran (*insight*) yang lebih jauh ke dalam dinamika eskalasi perang dingin.

c. Bentuk perubahan struktural

Gambaran kita mengenai kekuatan-kekuatan yang mendorong terjadinya eskalasi akan dilengkapi oleh model yang ketiga. Bentuk ini terdapat antara lain di dalam tulisan-tulisan Burton (1962), Coleman (1957), dan Schumpeter (1955, yang dipublikasikan untuk pertama kali pada tahun 1919). Bentuk perubahan struktural ini menjelaskan bahwa konflik, beserta taktik-taktik yang digunakan untuk mengatasinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan residu. Residu ini berupa perubahan yang terjadi baik pada pihak-pihak yang berkonflik maupun masyarakat di mana mereka tinggal. Residu ini kemudian mendorong perilaku contentious lanjutan, yang levelnya setara atau lebih tinggi, dan mengurangi usaha untuk mencari resolusi konflik. Dengan demikian, konflik yang terekalasi merupakan perubahan yang bersifat anteseden dan sekaligus konsekuen.

Tiga macam bentuk perubahan struktural dapat dibedakan, yaitu perubahan psikologis, perubahan dalam kelompok dan kolektif lainnya dan perubahan dalam masyarakat di sekeliling pihak yang berkonflik.

Perubahan psikilogis yang mungkin terjadi banyak dan beragam. Ketika konflik bereskalasi, berbagai sikap dan persepsi negatif terhadap pihak lawan biasanya akan berkembang. lawan dipersalahkan atas pembesarannya konversi. Sehingga tidak dapat dipercaya dalam arti dianggap berbeda dengan kita atau bahkan dianggap musuh kita. ketika kolektif (kelompok, organisasi, atau negara) yang terlibat dalam konflik, maka perubahan struktural juga terjadi pada tingkat kolektif.

Perubahan struktural mungkin juga dapat berbentuk polarisasi di dalam komunitas yang lebih besar di mana sebagai anggotanya adalah kaum antagonis. Pihak-pihak ketiga tergabung dengan salah satu antagonis, merupakan peran netral konstruksi yang seharusnya mereka mainkan. Hal penting yang terkandung di dalam semua perubahan ini adalah perubahan-perubahan tersebut memberikan sumbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap siklus eskalasi. Mereka merupakan hasil penggunaan taktik-taktik yang tereskalasi dan kemudian mendorong eskalasi yang lebih jauh. Sumbangan ini memiliki tiga bentuk yang pertama adalah perubahan-perubahan psikologis dan kolektif adalah mekanisme-mekanisme yang bekerja di dalam spiral konflik.[8]

2. Kajian tentang pemilihan umum

a. Pengertian pemilihan umum (pemilu)

Menurut UUD 1945 dan Amandemen Pasal 22E pengertian pemilu adl sebagai berikut:

1) Pemilihan umum adalah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali pada waktu yang bersamaan.
2) Pemilihan umum adalah diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, Presiden dan wakil Presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah.
3) Pemilihan umum adalah untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik.
4) Pemilihan umum adalah untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan.

[8] Dean G. Pruitt dan Jeffer Z. Rubin, *Loc.Cit*, hal. 200-207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Pemilihan umum adalah diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.[9]

Dengan demikian, maka pemilu adalah suatu alat yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat, kekuasaan yang lahir dengan pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah, menurut kehendak dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Akan tetapi pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasaan dalam negara. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang memilih dan mengendalikan kekuasaan dan kekuasaan itu dijalankan adalah demi kepentingan rakyat. Abraham licoln bekas Presiden AS pernah mengatakan, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.[10]

b. Sistem pemilihan umum (pemilu)

Konsep yang berkaitan erat dengan badan perwakilan rakyat adalah berupa sistem pemilihan umum, hal itu disebabkan salah satu fungsi sistem pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Oleh karena itu, berikut ini diuraikan sistem pemilu yang mengandung tiga variabel pokok yaitu sebagai berikut:

---

[9] UUD 1945 dan Amandemen, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2004-2009), hal. 13
[10] Parilian Donald, *Menggugat Pemilu*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Penyuaraan

Penyuaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara, pilihan yang dihadapi pemilih terdiri atas tiga kemungkinan, yakni pemilihan partai memilih calon, atau keduanya (partai politik dengan daftar calonnya).

2) Daerah pemilihan (electrorate district)

Daerah pemilihann adalah ketentuan yang mengatur beberapa jumlah kursi wakil rakyat setiap daerah pemilihan. Dalam menentukan daerah-daerah pemilihann ini setidak-tidaknya dua faktor harus dipertimbangkan, yakni wilayah administrasi pemerintahan jumlah pendidik.

3) Formula pemilihan

Formula pemilihan adalah rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politiknya apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.

Ketiga variabel itu bersifat saling berhubungan dari ketiga variabel ini, variabel ketiga yang terpenting krn kedua variabel lain ada kalanya merupakan konsekuensi logis yang pertama, itu sebabnya setiap sistem pemilihan umum digunakan dengan formula pemilihan yang digunakan.[11]

---

[11] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana, 1992), hal. 176-178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada 2 (dua) sistem pemilihan umum yaitu:

1) Pemilihan umum sistem distrik

Dalam pemilihan umum (pemilu) merupakan sistem distrik, daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik tertentu. pada masing-masing distrik pemilihan, tiap-tiap parpol mengajukan satu calon, katakanlah 2 dan 3 Kecamatan merupakan satu distrik. Partai X mencalonkan A untuk bersaing pada distrik tersebut. Partai Y mencalonkan B, dan partai Z mencalonkan C.

2) Pemilihan umum sistem proporsional

Sistem ini yang dianut di Indonesia, pemilih tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi sosial politik (orsospol). Para pemilih adalah pemilih tanda gambar atau lambang suatu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing-masing orsospol, ditentukan melalui penjumlahan suara secara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (provinsi daerah tingkat I). Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang bersangkutan.

Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah digantungkan pada jumlah suara yang diraih masing-masing parpol dan orsospol peserta pemilihan umum. Calon terpilih untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi wakil rakyat ditentukan berdasarkan nomer urut calon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing-masing daerah. Inilah yang disebut perhitungan suara secara proporsional, bukan menurut distrik pemilihan yang tiap distrik hanya bakal ada satu calon terpilih.

c. Tujuan pemilihan umum (pemilu)

Dalam mewujudkan penyusunan tata kehidupan yang dijiwai semangat cita-cita revolusi. Kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagaimana dalam Pancasila atau UUD 1945. maka penyusunan tata kehidupan itu haruslah dilakukan dengan jalan pemilu.

Adapun tujuan pemilu adalah :

1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum yang sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya.
2) Sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari rakyat/masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3) Pemilu merupakan sarana memobilisasi dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ketiga ini tidak hanya berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di negara berkembang tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara-negara industri maju) kendati sifatnya berbeda.[12]

B. Kajian Teoretik

1. Teori konflik

Teori konflik ini dipelopori oleh Ralf Dahrendorf yang mana teori konflik ini merupakan teori keturunan teori dari Karl Mark. Tetapi gambaran manusia sosial dari Mark lebih banyak bercorak kolektivitas, holistik dan organistis. Sedangkan manusia yang ditampilkan dalam teori konflik lebih banyak bersifat individualistik. Teori konflik melihat manusia sejauh ia dimotivasi oleh kepentingannya yang ada kaitannya dalam posisinya, dalam rangka subordinasi-subordinasi. Adapun baik dari konflik antar kelompok maupun intra kelompok, selalu ada dalam hidup bersama. Konflik tersebut sebagai interaksi yang penting dan sama sekali tidak boleh dikataka bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Justru konflik dapat menyumbang banyak kepada kelestarian dan mempererat hubungan antara anggotanya.

Telah diketahui bahwa dasar Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan persial serta perumusan kembali teori Karl Mark. Dalam usaha melakukan penyangkalan persial teori Mark itu Dahrendorf menunjukkan beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat industri. Semenjak abad ke-19. Di antara perubahan-perubahan itu ialah : (1) dekomposisi

[12] *Ibid.*, hal. 181-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal; (2) dekomposisi tenaga kerja dan; (3) timbulnya kelas menengah baru. Menurut Dahrendorf dekomposisi modal ini melahirkan kesulitan untuk mengidentifikasi kaum borjuis yang memiliki monopoli eksklusif atas modal maupun pengendalian perusahaan.

Dahrendorf menyatakan bahwa ada dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilihan sarana produksi Mark sebagai dasar perbedaan kelas itu. menurut Dahrendorf hubungan-hubungan kekuasaan (*autbority*) yang menyangkut bawahan dan atasan menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas, perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan daripada pemilihan sarana-sarana produksi.

Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan di antara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Sebagaimana dikatakan Dahrendorf (1959 : 176) "secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisa bila dilihat sebagai pertentangan mengenal legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan". Dalam setiap asosiasi kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya. Sementara kepentingan-kepentingan kelompok bahwa melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya.

Kepentingan-kepentingan yang dimaksudkan Dahrendorf mungkin bersifat manifes (disadari) atau laten (kepentingan potensial) kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laten adalah tingkah laku potensi (*undercurrents behavior*) yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tetapi masih belum disadari.[13]

Jadi teori konflik melibatkan diri dengan perbandingan yang tidak jelas untuk membangun gambaran tentang dunia sosial Dahrendorf analog antara sistem Biologi dan sistem sosial itu sendiri diganti oleh suatu konsepsi mengenai "suatu sistem yang harus dikordinasi". Sejauh saya lihat dari sisi Weber hal ini merupakan suatu istilah yang sangat ruwet untuk sistem "otoritas" atau sistem "kekuasaan". Dalam konteks tersebut perbedaan antara otoritas dan kekuasaan penting, kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan. Sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang di legitimasikan, kekuasaan yang telah mendapat pengakuan umum. Alam konteks pembicaraan kata ini, perbedaan itu akan kurang penting, butir yang penting sekali ialah bahwa suatu "aspirasi yang harus dikoordinasi" (*imperativecy coordinate association*) adalah setiap organisasi di mana otoritas itu ada yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi dan keberadaan otoritas itu sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik. Titik tolak untuk melihat kekuasaan dan otoritas tidaklah sangat berbeda dari parsons, keduanya melihat hal itu sebagai keharusan walaupun Dahrendorf kelihatannya kurang senang dalam istilah "prasayarat fungsional" keudanya sangat setuju bahwa suatu fungsi dari

[13] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan adalah untuk mengintegrasikan sebuah unit, mendorong pemenuhan yang gagal dilakukan oleh norma-norma dan nilai-nilai.[14]

Teori-teori Dahrendorf adalah suatu yang dalam tingkat rendah terbagi dalam dua bagian :

a. Suatu tingkat properti teori pokok: bahwa struktur-struktur pernah melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementer.
b. Deskripsi-deskripsi umum tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan konflik-konflik.

Sedangkan teori konflik atau teori koersi (paksaan) terdiri dari pengertian-pengertian sebagai berikut:

a. Tiap-tiap masyarakat di segala bidangnya mengalami proses perubahan sosial terhadap di mana-mana dan rupanya manusia tidak puas dengan apa yang telah dicapai oleh para pendahulunya.
b. Tiap-tiap masyarakat memperlihatkan perbantahan (disensus) dan konflik dari segala bidangnya, konflik sosial ada di mana-mana dan tidak semua orang sepaham dan sesuai tidak semua orang setuju ada pro dan kontra, hal di mana dari banyak sebagai ancaman terhadap kesatuan terhadap kesatuan masyarakat atau kelompok, Max Weber mengatakan bahwa para dewa di olimpus terpecah belah di kalangan mereka sendiri.

[14] Parson dan Hebersmas, *Teori-teori Sosial Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tiap-tiap unsur di dalam masyarakat menyumbang kepada disintegrasi dan perubahannya. Artinya: setidak-tidaknya salah satunya terdapat unsur yang menceritakan.

d. Tiap-tiap masyarakat terdiri atas dasar paksaan yang dikenakan oleh ssegelincir orang atau anggota sesama anggotanya. Maka adanya bersatunya masyarakat karena adanya suatu paksaan.[15]

Selain itu Dahrendorf mengatakan ada tiga hal dalam kehidupan masyarakat yang saling berhubungan yaitu: kelompok, konflik dan perubahan atau singkatan Dahrendorf mengatakan bahwa segala perubahan setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal, bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Adapun ciri-ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan statusnya.[16]

2. Teori konflik dalam pendangan Dahrendorf

Asumsi terjadinya yang menyadari teori sosial non Marxian Dahrendorf adalah :

a. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai andil bagi terjadinya disentegrasi dan perubahan sosial.

---

[15] K.J. Veoger, *Realitas Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 211-214

[16] George Ritzer dan Douglas Goodman, *Teori Sosiolog Modern*, (Jakarta: Pradana, 2004), hal. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masyarakat selalu dalam keadaan konflik menuju proses perubahan. Masyarakat terintegrasi atas dasar dominan (borsuasi) menguasai proletar.

Konflik kelas ini disebabkan tidak adanya pemisahan antara pemilikan serta pengendalian sarana-sarana produksi.

Dahrendorf, mengkeritik teori Marx dengan alasan :

a. Lemah secara konseptual dengan mencakur-adukan konflik kelas sebagai penyebab perubahan sosial (bersifat sosiologis, empiris dapat diuji) dengan masyarakat kapitalis (bersifat filosofis tidak dapat diverifikasi).
b. Pendapat Marx tentang pemilkan sarana produksi (pengertian hak milik dalam arti sempit)
c. Kapitalis yang digambarkan Marx telah mengalami transformasi (tidak melalui revolusi).
d. Kapitalisme hanya salah satu sub tipe masyarakat industri pasca industri.
e. Pertentangan kelas semakin ruwet karena melihatkan faktor ekonomi dan politik.

Fungsi konflik menurut Dahrendorf adalah sebagai berikut:

a. Membantu membersihkan suasana yang sedang kacau
b. Katub penyelamatan berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Energi-energi agresif dalam konflik ralitas (berasal dari kekecewaan) dan konflik tidak realitas (berasal dari kebutuhan untuk meredahkan ketegangan).

d. Konflik tidak selalu berakhir dengan rasa permusuhan.

e. Konflik dapat dipakai sebagai indikator kekuatan dan stabilitas suatu hubungan.

f. Konflik dengan berbagai outgroup dapat memperkuat kohesi suatu kelompok.

Dahrendorf adalah tokoh utama teori konflik "wewenang" dan "posisi" sebagai konsep sentral teorinya. Dahrendorf menyatakan pula bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan. Karena mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status Quo.

Dahrendorf melihat bahwa "kepentingan" yang dikaitkan dengan peran-peran didefinisikan sebagai peran-peran yang diharapkan. Hal itu bukanlah kepentingan "meterial".[17]

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai konflik sosial penelitian temukan sebagimana tabel berikut ini :

[17] Basrowi dan Soeyono, *Teori Sosiologi Dalam Tiga Paradigma*, (Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004), hal. 34-35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai konflik sosial

No	Peneliti	Judul	Bentuk	Tahun	Pokok Persoalan
1.	Titik Suwariyati[18]	Konflik-konflik sosial bernuansa komunitas kasus keseluruhan sosial di banjarmasin 1997.	Peneliti	1997	Konflik sosial yang bernuansa agama
2.	Umar Surur[19]	Konflik sosial bernuansa sara berbagai komunitas etnis di Kalimatan Barat.	Penelitian	2001	Konflik sosial yang bernuansa sara
3.	Mursyid Ali[20]	Konflik sosial bernuansa agama studi kasus tentang tragedi kerusuhan Poso.	Penelitian	2005	Konflik sosial bernuansa agama
4.	Ibnu Hasan Muchtar[21]	Konflik-konflik bernuansa agama studi kasus kerusuhan Kupang Nusa Tenggara Timur.	Penelitian	1998	Konflik yang bernuansa agama
5.	Arya Hadi Wijaya[22]	Konflik-konflik sosial bernuansa agama studi kasus kerusuhan Lampung.	penelitian	2002	Konflik sosial yang bernuansa agama
6.	Sudjangi[23]	Konflik-konflik sosial bernuansa agama studi kasus kerusuhan Ambon.	Penelitian	2002	Konflik sosial bernuansa agama
7.	Nur Aini	Konflik sosial pada pemilu legislatif 2009 di desa Raci Wetan Kabupaten Gresik.	Skripsi	2009	Konflik sosial yang bernuansa politik

Dalam penelitian terdahulu yang relevan mengenai konflik sosial sebagaimana tabel 2.1 yaitu bernuansa agama dan SARA. Sehingga berbeda dengan peneliti yang bernuansa politik oleh karena itu penelitian tertarik

[18] Badan Litbang Agama dan Diklat keagamaan konflik sosial bernuansa agama di Indonesia, (Departemen Agama RI, Jakarta, 2003), hal. 1
[19] *Ibid.*, hal. 25
[20] *Ibid.*, hal. 79
[21] *Ibid.*, hal. 107
[22] *Ibid.*, hal. 135
[23] *Ibid.*, hal. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan fenomena "Konflik Sosial Pada Pemilu Legislatif 2009" yaitu di desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

Setelah mencari data dari beberapa skripsi yang telah diamati maka telah ditemukan judul sebagai berikut :

1. Dari Titik Suwariyati: dengan judul konflik-konflik sosial bernuansa komunitas kasus kerusuhan sosial di Banjarmasin 1997 pokok persoalannya adalah konflik sosial yang bernuansa agama.
2. Dari Umar Surur dengan judul: Konflik sosial bernuansa SARA berbagai komunitas etnis di Kalimatan Barat, tahun 2001, pokok persolannya yang diteliti adalah mengenai konflik sosial bernuansa SARA.
3. dari Mursyid Ali dengan judul: Konflik sosial bernuansa agama studi kasus tentang tragedi kerusuhan Poso pada tahun 2005. pokok persoalannya adalah tentang konflik sosial bernuansa agama.
4. Ibnu Hasan Mukhtar dengan judul: konflik bernuansa agama studi kasus kerusuhan Kupang Nusa Tenggara Timur 1998. pokok persoalannya adalah konflik sosial bernuansa agama.
5. Dari Arya Hadi Wijaya dengan judul: Konflik-konflik sosial bernuansa agama studi kasus kerusuhan Lampung pada tahun 2002. pokok persoalannya adalah tentang konflik sosial bernuansa agama.
6. Dari Sudjangi dengan judul: Konflik-konflik sosial bernuansa agama studi kasus kerusuhan Ambon pada tahun 2002. pokok persoalannya adalah konflik sosial bernuansa agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id